

Pilkada Rasa Pilpres Al-Maidah 51 dan Politisasi Simbol Agama dalam Kontestasi Politik di Pilkada DKI Jakarta

by Saipul Hamdi

Submission date: 07-May-2023 08:55AM (UTC-0500)

Submission ID: 2086480399

File name: Simbol_Agama_dalam_Kontestasi_Politik_di_Pilkada_DKI_Jakarta.pdf (418.39K)

Word count: 7127

Character count: 43457

Pilkada Rasa Pilpres:
Al-Maidah 51 dan Politisasi Simbol Agama dalam Kontestasi Politik di Pilkada DKI
Jakarta

Saipul Hamdi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Sosiologi
Universitas Mataram, Mataram
e-mail: shamdi@unram.ac.id

Abstract

The blasphemy case of "Al-Maidah 51" by the former governor of DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama or better known as Ahok has prompted massive demonstrations by Muslims from various regions demanding law enforcement against Ahok and the cancellation of his candidacy as a candidate for governor after he became a suspect. This case gave birth to pros and cons in the community because it was considered to be thick with political nuances and the interests of power, especially in the context of the contestation in the 2017 DKI Regional Election. Therefore, this article aims to examine the efforts to politicize religious symbols by politicians and Islamic organizations involved in the 2017 DKI Jakarta Pilkada. In particular, this article also explores the reactions and attitudes of Muslim leaders to the case of Al-Maidah 51, their interpretation of this verse and its relation to the status of non-Muslim leadership, and the impact of this case on the economic development of the community, relations between religious communities, and tolerance.

Keywords: : DKI Regional Head Election, Contest, Blasphemy, Ahok, Al-Maidah 51.

Abstrak

Kasus penistaan agama "Al-Maidah 51" oleh mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok telah mendorong terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran oleh umat Islam dari berbagai daerah yang menuntut penegakan hukum kepada Ahok dan pembatalan pencalonannya sebagai calon gubernur setelah menjadi tersangka. Kasus ini melahirkan pro dan kontra di masyarakat karena dinilai kental dengan nuansa politis dan kepentingan kekuasaan, khususnya dalam konteks kontestasi pada Pilkada DKI 2017. Fenomena kasus Al-Maidah 51 terlihat kompleks karena semua agen berangkat dari argumen masing-masing baik dari kelompok Islamis maupun nasionalis. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menguji upaya politisasi simbol agama oleh para politisi dan Ormas Islam yang terlibat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Secara khusus artikel ini juga mengeksplorasi reaksi dan sikap tokoh-tokoh Muslim terhadap kasus Al-Maidah 51, penafsiran mereka terhadap ayat ini dan hubungannya dengan status kepemimpinan non-Muslim, dan pengaruh kasus ini terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, relasi antar umat agama, dan toleransi.

Kata Kunci: : Pilkada DKI, Kontestasi, Penistaan Agama, Ahok, Al-Maidah 51.

PENDAHULUAN

'Pilkada rasa Pilpres', itulah ungkapan yang muncul selama masa penentuan calon dan kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Ungkapan tersebut merupakan gambaran dari besarnya magnet Pilkada DKI Jakarta yang dinilai dapat menjadi batu loncatan menuju kursi presiden. Kasus terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada Pilpres 2014 menjadi peristiwa politik baru di Indonesia, di mana popularitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta telah mempermudah jalannya menuju kursi nomor satu di Indonesia. Melihat kesuksesan Jokowi yang notabene mantan gubernur memicu pemimpin daerah di luar Jakarta ikut mencalonkan diri menjadi Gubernur

DKI dengan harapan memperoleh akses politik yang lebih luas sebagai calon peresiden pasca purna tugas di Jakarta. Imaginasi politik inilah yang membuat Pilkada DKI semakin ramai dan persaingan semakin kuat antara calon selama masa kampanye.

Pilkada DKI Jakarta 2017 memperlihatkan fenomena yang tidak biasa karena diikuti oleh kasus “penistaan agama” yang melibatkan salah satu kuat dari petahana Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok (Mayasari, 2017; Prayogi, 2019). Statemen Ahok yang mempertanyakan dan menantang pengguna di balik kebenaran Al-Maidah 51 untuk tujuan politik mewarnai Pilkada Jakarta dan sangat mempengaruhi hasilnya karena tekanan demonstrasi besar-besaran dalam aksi 411 dan 212 oleh umat Islam. Kasus Ahok rawan dimanfaatkan dan dikapitalisasi oleh tokoh-tokoh politik dan juga Ormas Islam yang telah menyatakan ketidaksetujuannya kepada posisi Ahok yang menjadi gubernur Jakarta dan kembali mencalonkan diri (Lestari, 2019; Prayogi, 2019). Abdul Hamid (2014), Burhanuddin Muhtadi (2018), Edward Aspinall (2011), dan Ken Miichi (2014) melihat kuatnya politik identitas keagamaan dan kesukuan dalam pesta demokrasi di Indonesia pasca Suharto. Politisasi Sara yang menimpa pasangan Ahok-Jokowi telah muncul sejak Pilkada Jakarta 2012 ketika Fauzi Bowo menghadirkan image sebagai sosok religius dalam penggalangan dukungan massa (Miichi, 2014). Fenomena politisasi symbol agama dan Ras oleh politisi dan Ormas Islam garis keras terulang kembali pada Pilkada Jakarta 2017. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya-upaya politisasi simbol agama oleh politisi dan Ormas Islam dalam kasus penistaan agama pada Pilkada Jakarta.

Kasus penistaan agama di Indonesia bukanlah fenomena baru, sejak pemerintahan Suharto kasus penistaan agama telah muncul dan masuk dalam pasal undang-undang pidana KUHP (Mandarani & Suwarta, 2017; Huda, 2019). Di antara kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Hans Bague Jassin yang menerbitkan cerpen tentang Muhammad dan Jibril turun ke Indonesia, Arswendo yang pernah melakukan survey siapa tokoh yang paling disukai oleh rakyat Indonesia dan menempatkan mantan presiden Suharto nomor 1 dan Nabi Muhammad urutan ke 11, Lia Eden pendiri agama Salamullah yang mengaku sebagai malaikat Jibril dan bunda Maria, Musaddiq pendiri Alqiyadah dan Gafatar yang juga mengaku seorang nabi, dan Tajul Muluk penyebar ajaran Syiah di Jawa Timur. Mereka yang terkena kasus penistaan agama tersebut diadili pengadilan dan masuk penjara. Kasus Ahok adalah kasus penistaan dengan atensi terbesar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat reaksi tokoh-tokoh dan masyarakat Muslim terhadap kasus Ahok dan bagaimana mereka menafsirkan kembali Al-Maidah 51 dalam konteks demokrasi modern dan kebhinekaan di Indonesia.

Keterbelahan bangsa Indonesia pasca mencuatnya kasus Ahok menjadi ancaman serius, tidak hanya di internal umat Islam, tetapi juga di lingkup eksternal. Di internal Islam para tokoh saling mengkafirkan karena berbeda posisi dalam melihat statemen Ahok. Bagi yang kontra Ahok melihat kitab suci di atas segalanya sehingga tidak berhak kelompok menirotas memimpin mayoritas. Sebaliknya, mereka yang pro melihat tidak ada yang dilanggar oleh Ahok ketika mencalonkan diri karena sesuai amanat Undang-undang 1945 yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap warga negara dalam semua hal termasuk menduduki jabatan publik seperti Gubernur dan Presiden. Mereka juga mengklaim bahwa kelompok yang menentang Ahok tidak Pancasila dan anti kebhinekaan. Kedua kelompok ini terus mencari simpati publik melalui aksi demonstrasi baik yang pro dan kontra. Kondisi ini mengarahkan artikel ini untuk melihat kontestasi kedua kelompok di ruang publik, khususnya demonstrasi yang dilakukan dan bagaimana pengaruh kasus Ahok terhadap keterbelahan masyarakat dan keberlanjutan toleransi antar umat beragama.

METODE

Riset ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara di dalam pengambilan dan analisa data. Selain itu, saya juga menggunakan data skunder dari berbagai dia untuk melengkapi data wawancara. Media memberikan atensi besar terhadap kasus Ahok yang bertepatan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta. Hampir tidak ada peristiwa yang tidak terekam oleh media selama kasus penistaan agama ini muncul di ruang publik dan pengaruhnya terhadap elektabilitas Ahok di komunitas Muslim selama Pilkada DKI Jakarta. Data-data dari media ini diolah, dianalisa dan dicrosscek keberannya dengan hasil wawancara. Dalam analisa data akan digunakan teori identitas dan politisasi simbol agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ahok dan Perlawanan Politik Agama FPI

Basuki Tjahaja Purnama adalah salah satu tokoh yang kontroversial yang banyak mendapat atensi dari masyarakat sejak menggantikan Jokowi sebagai gubernur Jakarta setelah terpilih sebagai presiden 2024. Keberaniannya berbicara apa adanya, jujur, dan terkadang melawan arus baik dalam berpikir maupun bertindak juga menarik perhatian awak media. Ahok yang berasal dari kelompok minoritas etnis China dan beragama Kristen Protestan membuat posisi Ahok seringkali menjadi bahan cibiran terutama oleh kelompok Muslim geris keras yang tidak setuju atas kepemimpinannya (Nasrudin and Nurdin 2019). Bahkan seringkali Ahok bersitegang dengan lembaga legislatif karena membongkar adanya agenda *hidden corruption* dalam penyusunan anggaran atau yang dikenal dengan anggaran “siluman”. Meski demikian Ahok tetap konsisten dengan gaya kepemimpinannya yang mengedepankan ketegasan, kritis, lepas, tidak pandang bulu, terbuka professional dan berkeadilan. Namun di luar itu, terdapat sifat dan karakter Ahok yang kurang mendapat simpati publik karena bahasanya yang tidak terkontrol, ceplas-ceplos, dan cenderung kasar ketika berkomunikasi dengan warga atau patner kerjanya di pemerintahan. Sebagian masyarakat menilai ketidakwajaran sikap tersebut khususnya sebagai pejabat publik yang menjadi contoh bagi masyarakat, tetapi sebagian justeru melihat sikap tersebut wajar dan memiliki nilai yang positif dan cocok dengan karakter masyarakat ibu kota yang keras, kasar dan kuat dengan budaya premanismenya (Sutisna, 2019, Rani, 2019).

Nama Ahok mulai dikenal secara nasional setelah menjadi wakil calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo pada Pilkada DKI 2012. Jokowi dan partai pendukungnya PDIP dan Gerindra memilih Ahok untuk menemani Jokowi sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI 2012, yang pada saat itu Ahok adalah anggota legislatif DPR RI dan kader aktif Gerindra (Hamid, 2014). Melalui perjuangan yang panjang dan berat karena selain berhadapan dengan calon-calon kuat dari berbagai daerah dan juga putera daerah termasuk calon petahana Fauzi Bowo, tetapi juga berhadapan dengan kelompok ortodoks Muslim dari berbagai Ormas yang menolak pencalonan Ahok karena bergama Kristen. Atas nama agama dan politik identitas sebagian kelompok Muslim terutama FPI menolak dengan keras paket Jokowi-Ahok (Miichi, 2014: 56). Joko pada akhirnya berhasil memenangkan Pilkada dalam dua putaran dengan perolehan suara 53,82 persen atau sekitar 2.472.130 suara (Miichi, 2014: 63; Supriyadi, 2015: 419). Terpilihnya Jokowi-Ahok membawa harapan baru atas perubahan Jakarta menuju kota modern dan metropolis.

Gaya politik belusukan Jokowi lintas ruang dan kelas menjadi modal politik dan trend baru yang digandrungi masyarakat Indonesia yang tengah jemu dengan gaya formalitas dan mengedepankan status sosial yang melekat pada sosok pemimpin selama ini. Baru memimpin 2 tahun sebagai gubernur DKI Jakarta, dia harus meninggalkan jabatannya untuk kontestasi pada Pilpres 2014. Jokowi yang berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla yang diusung oleh PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan suara 53, 15% mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang hanya meraih

suara 46,85% (Muhtadi, 2018) . Setelah Jokowi dilantik sebagai presiden maka secara otomatis Ahok menggantikannya memegang kendali pemerintahan sesuai dengan amanat undang-undang. Kekhawatiran kelompok Mulsim garis keras seperti FPI yang dari awal menolak kehadiran paket Jokowi-Ahok yang notabenehnya pasangan calon Muslim-non Muslim menjadi kenyataan. Ahok kemudian dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta 2014 sampai 2017 dan mendapat perlawanan keras dan penolakan yang luar biasa dari FPI (Abdullah & Mohamed Osman, 2018; Kurniawan, 2018).

FPI memprotes keras pelantikan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta oleh Jokowi dengan melakukan demonstrasi secara intens dan massif di depan Balaikota. Tuntutan FPI dan beberapa Ormas Islam yang menolak pelantikan Ahok tidak digubris oleh presiden Jokowi karena alasan penegakan konstitusi. Sebaliknya, atas nama penegakan syari'at Islam FPI melakukan resistensi politik dengan mengangkat gubernur sendiri sebagai pemimpin tandingan. Imam Besar Habib Rizieq Syihab (HRS) dalam sebuah orasi di depan demonstran mengatakan bahwa ustaz Fahururrozi Ishaq jauh lebih layak memimpin Jakarta dibanding dengan Ahok yang dari Kristen. Ahok dinilai oleh HRS haram sebagai pemimpin karena beragama Kristen. Menurut ustaz Ishaq, apabila dilakukan pemilihan tidak akan ada yang memilih Ahok, oleh karena itu dia sangat siap menggantikan Jokowi memimpin Jakarta (Sutanto, 2014). Rizieq dalam sebuah kesempatan juga menjelaskan penolakannya kepada Ahok karena sikap Ahok yang kontroversi dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Selama pemerintahan Ahok FPI tetap kritis dan menjadi oposan pemerintah DKI Jakarta. Tidak jarang anggota FPI bentrok dengan polisi dan satpol PP Pemda DKI ketika menjalankan eksekusi kebijakan yang dihadap oleh massa FPI.

Di tengah tekanan hebat dari beberapa tokoh Ormas Islam, perjalanan gubernur Ahok memimpin Jakarta mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Segudang persoalan DKI Jakarta mulai dari banjir, kemacetan, pengangguran, tindak kriminal dan rumah kumuh dibenahi dan ditata ulang. Banjir yang menjadi fokus kerja Ahok mulai berkurang sejak menertibkan pemukiman-pemukinan liar yang tinggal di pinggir sungai yang berstatus ilegal karena tidak memiliki sertifikat tanah (Hamdi, 2017; (Muhtadi 2018). Ahok tidak menggunakan istilah penggusuran, tetapi relokasi karena mereka disediakan perumahan susun (Rusun) yang jauh lebih layak ditempati. Rusun-rusun ini dilengkapi dengan fasilitas yang tidak kalah dengan perumahan-perumahan yang ada seperti ruang bermain anak-anak, bis gratis mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah, masjid dan lain-lain. Penggusuran yang memakan korban tentu tidak bisa memuaskan semua warga, akan tetapi perlahan-lahan masyarakat mulai menerima meski tidak seratus persen. Sikap Ahok yang tanggap dan responsip dengan berbagai masalah di ibu kota Jakarta menjadi nilai plus dan modal besar untuk mencalonkan diri pada Pilkada serentak 2017.

Pilkada DKI Rasa Pilpres: Al-Maidah Berujung Perlawanan Umat

Pilkada serentak yang diselenggarakan oleh KPU pada 2017 termasuk untuk wilayah DKI Jakarta telah menimbulkan dinamika politik yang luar biasa. Selain menarik daya pikat para calon terbaik dari luar daerah untuk bertarung pada Pilkada DKI, juga adanya image dan opini yang berkembang bahwa Pilkada DKI menjadi batu loncatan sebagai presiden. Opini ini berkembang pasca keberhasilan Jokowi pada Pilpres 2014 yang tidak lepas dari jabatan sebelumnya yakni sebagai gubernur DKI. Jokowi meninggalkan DKI Jakarta yang baru dipimpin dua tahun untuk kontestasi Pilpres dan memenangkannya. Dari sinilah para tokoh menilai jabatan gubernur DKI Jakarta hanya menjadi batu loncatan untuk menuju kursi presiden Republik Indonesia. Ungkapan yang populer pada waktu itu adalah "Pilkada Rasa Pilpres" itulah ungkapan yang muncul akibat panas dan prestisnnya kursi Jakarta 1.

Ahok sebagai petahana memainkan peran penting dalam percaturan politik DKI sebagai petahana. Dia sangat berpeluang memenangi Pilkada di DKI Jakarta berdasarkan hasil survei

oleh lembaga survei nasional yang selalu di atas 50%, lebih tinggi dibanding calon lain. Posisi Ahok yang non partisan atau tidak berpartai sejak keluar dari partai Gerindra karena merasa tidak cocok lagi dengan visi dan misi partai tersebut telah memanaskan suasana pada pencalonan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta. Ahok dalam kenyataannya ingin maju melalui jalur independen supaya tidak dikontrol oleh partai politik dalam menentukan kebijakan. Ahok membentuk tim sukses yang dikenal dengan #TemanAhok. Tim sukses ini diberi tugas untuk langkah awal menggalang dukungan KTP sebanyak 500.000 sebagai syarat untuk maju lewat jalur independen. Supaya lebih aman dan lolos tahap verifikasi Ahok menginstruksikan pengumpulan KTP sebanyak 1 juta (Al Azhari, 2016).

“KTP gue untuk Ahok” adalah jargon yang digunakan oleh #temanahok dalam pengumpulan KTP dan mendapat respon positif dari berbagai komunitas. Posko #temanahok selalu ramai didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat, seniman, artis, musisi dan politisi. Untuk pertama kali dalam sejarah 1 juta KTP terkumpul oleh #temanahok. Meskipun melalui jalur independen Ahok mendapat dukungan dari partai politik Nasdem dan Hanura. Sedangkan PDIP sempat menjauh karena Ahok melakukan deparpolisasi, mengecilkan peran partai karena memilih jalur independen. Ahok memilih Budi Heru Hartono menjadi Cawagub karena Djarot tidak memberikan kepastian untuk mendampinginya melalui jalur independen. Djarot Saiful Hidayat masih setia dengan partai PDIP yang telah membesarkan namanya. Setelah resmi tidak bersama lagi dengan Djarot dan PDIP, Ahok mulai mendapat serangan dan tekanan partai politik PDIP. Bahkan Ahok digoyang lewat isu korupsi dan suap ke #temanahok (Yuanita, 2016).

Melalui proses yang panjang, Ahok akhirnya memilih jalur partai politik setelah mendapat dukungan dari partai besar. Ahok khawatir akan adanya manipulasi terhadap proses verifikasi pencalonan pada jalur independen, yang dapat menggagalkan dirinya maju pada Pilkada. Ahok kembali berpasangan dengan Djarot dan melepas Heru dengan melancarkan simbol baju kotak-kotak dan salam dua jari sebagai jargon kampanye. Ada tiga pasangan calon yang maju pada Pilkada DKI Jakarta yaitu Agus Harimurti Yudoyono (AHY)-Sylviana Murni yang didukung oleh PKB, Demokrat, PPP dan PAN, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang memperoleh dukungan dari PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan dukungan Gerindra dan PKS (Lestari, 2019; Muhtadi, 2018; Nasrudin, 2019). Pertarungan ketiga calon ini juga melibatkan tokoh-tokoh besar di belakang mereka yakni SBY, Megawati dan Prabowo. Hasil survei LSI masih menempatkan Ahok-Djarot di urutan pertama 31,1%, Anies-Sandi 21,4% dan Agus-Sylviana 19,1%. Musim kampanye resmi ditetapkan oleh KPU dan Pilkada DKI Jakarta semakin panas tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di luar daerah yang sengaja datang ke Jakarta untuk mendukung calon masing-masing. Para politisi dari partai masing-masing diinstruksikan untuk datang ke Jakarta ikut berkampanye. Kahirur Rizal, pengurus partai Demokrat asal NTB menceritakan pengalamannya selama Pilkada DKI Jakarta turun langsung ke lapangan mengajak semua orang yang ditemuinya mendukung calonnya AHY-Selviana meskipun baru kenal. Dukungan melalui media sosial FB, twitter, instagram dan WhatsApp terus bermunculan, dan tidak sedikit saling menjelekan, mengkritisi dan menjatuhkan lawan politiknya.

Pasangan Ahok-Djarot adalah calon yang seringkali mendapat serangan baik di media maupun di gelanggang kampanye. Ahok tersandera dengan kasus penistaan agama yang dikapitalisasi oleh rival politik dan kelompok Islam FPI dengan demon yang tiada hentihentinya. Ahok juga menghadapi hadangan di lapangan oleh pendukung calon lain, di mana dia diusir dan diteriaki sebagai penista agama Islam. Menghadapi masalah tersebut tim sukses Ahok melaporkan ke polisi dan ke Bawaslu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung calon lain. Ahok juga menghadapi serang dari pimpinan kepala daerah dan tokoh-tokoh Islam dari luar Jakarta. TGB Zainul Majdi, gubernur NTB memperingatkan Ahok supaya berhati-hati dengan pernyataannya yang dinilai menghina agama Islam. TGB menyatakan bahwa

bukan wilayah Ahok bicara kitab suci agama Islam. TGB mengingatkan kepada semua orang untuk tidak menghina agama apapun dan saatnya untuk mengobati luka umat Islam tanpa harus kehilangan akal sehat (Nursyamsyi 2016). Dia satu-satunya gubernur yang ikut aksi 212 dengan alasan membela agama Islam. Oleh karena itu image tentang TGB dianggap sosok yang menentang pemerintah dan berada di kubu lawan. TGB kemudian di daulat sebagai salah satu tokoh Islam yang memiliki pengaruh dan diwacanakan masuk bursa calon presiden atau wakil presiden.

Reaksi Masyarakat dan Perdebatan Panjang atas Ucapan Ahok

Ceramah Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah 51 di Pulau Peramuka Kepulauan Seribu 27 September 2016 menjadi viral setelah Buni Yani, mantan wartawan majalah Tempo memposting potongan ceramahnya di FaceBook. Yani hanya mengambil potongan ceramah Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah 51, dan menghilangkan beberapa kata. Dalam FBnya Yani menulis “*Penistaan terhadap agama? Bapak-ibu [pemilih Mulsim]... dibohongi surat Al Maidah 51”... dan “masuk neraka [juga bapak-ibu] dibodohi”*. Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini. Postingan Yani menimbulkan diskusi publik dan turbulensi politik pada Pilkada DKI yang sebentar lagi memasuki masa kampanye (Malik, 2016; Prayogi, 2019). Ahok dinilai menistakan agama oleh sebagian Ormas Islam dan menuntut Ahok supaya dipenjarakan. Beberapa tokoh yang mewakili Ormas Islam melaporkan kasus Ahok ke Kaplori atas dugaan kasus penistaan agama. Di antaranya adalah Habib Novel dari FPI, Khairul Sakti Lubis dari Angkatan Muda Muhammadiyah, Forum Anti Penistaan Agama (Fapa) dan penceramah agama dan pembina Majelis Taklim Al-Muhtadin Irena Handono. Mereka melaporkan Ahok sejak tanggal 7 Oktober 2016 (Qorib, 2016)

Statemen Ahok menyebar dengan cepat melalui media elektronik dan cetak setelah diedit dan disebarkan Yani. Bahkan televisi nasional setiap malam memberitakan perkembangan kasus ini dan menyelenggarakan dialog publik dengan tokoh-tokoh yang kompeten di bidang agama. TvOne dan MetroTV merupakan channel yang paling aktif mengadakan diskusi-diskusi dengan menghadirkan tokoh yang pro dan kontra. Pro dan kontra atas kasus Ahok memanaskan suasana politik nasional pada Pilkada DKI Jakarta dan akan berimbas pada Pilpres 2019. Menurut pendukung Ahok bahwa kasus ini bersifat politis karena para pendemo dan penuntut Ahok adalah kelompok yang tidak ingin Ahok dicalonkan kembali sebagai gubernur DKI Jakarta. Demonstrasi pertama kali dilakukan oleh massa Islam yang tergabung dalam FPI dan beberapa tokoh nasional seperti mantan ketua Muhammadiyah Amin Rais dan aktivis kemanusiaan Ratna Sarumpaet 14 Oktober 2016. Para demonstran mendatangi kantor Polri menuntut Ahok dihukum seberat-beratnya terkait kasus penistaan agama. Amin Rais yang berada di tengah-tengah pendemo meminta polisi agar menindaklanjuti laporan masyarakat dan mempercepat proses hukum. Sobri Lubis, ketua FPI membacakan pernyataan dan sikap yang menilai Gubernur Ahok telah menistakan agama Islam, menodai Al-Quran dan melecehkan ulama dan menghina umat Islam. Habib Rizieq Sihab juga menyatakan bahwa Ahok menghina ayat Al-Quran surat Al-Maidah 51 (Al Faqir, 2017)

Kasus surat Al-Maidah 51 terus menjadi bola liar yang berdampak luas terhadap kondisi keragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia. Al-Maidah 51 melahirkan keterbelahan ulama dan perdebatan hebat di hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam ruang akademik, tetapi juga non akademik, yang diskusinya di warung-warung kofi melibatkan sopir angkot dan kelompok grass root. Keterbukaan media telah membangunkan kesadaran partisipasi politik masyarakat, yang dijadikan infrastruktur dan superstruktur dalam mengevaluasi kepemimpinan seorang tokoh. Perdebatan di dunia maya tidak kalah dengan perdebatan di alam nyata. Dunia maya seperti FB, Twitters, instagram, whatapp dan media sosial lainnya menyediakan ruang yang tidak terbatas untuk

mengekspresikan pemikiran, ekspresi, emosi dan gagasan-gagasan dalam menyikapi sebuah fenomena. Al-Maidah 51 semakin populer di masyarakat setelah terseret kedalam kasus penistaan agama ini, bahkan banyak muncul penafsir-penafsir baru Al-Quran khususnya Al-Maidah 51.

Tafsir Sosial Al-Maidah 51 dan Kapitalisasi Agama Sebagai Counter Politik

Surat Al-Maidah 51 memainkan peran penting dalam konstruksi identitas politik masyarakat Muslim pasca Reformasi. Karena terkait dengan kekuasaan dan kepemimpinan, maka ayat ini seringkali digunakan untuk kepentingan politik yang sifatnya musiman. Ayat ini banyak dibaca dan dibahas ketika musim Pilkada dan Pilpres untuk memastikan apakah proses dan produk politik tersebut sesuai dengan petunjuk agama. Politisasi simbol agama tidak dapat dihindari demi meraih suara dalam pesta demokrasi dalam Pilkada dan Pilpres. Kelompok minoritas adalah kelompok yang dirugikan dalam kasus politisasi simbol agama. Ahok dalam bukunya *Merubah Indonesia* menulis pengalaman politiknya yang melihat adanya ¹³num-oknum politisi yang berlindung di balik ayat kitab suci. Ahok mengatakan, fenomena ini tidak hanya terjadi di dalam Islam, tetapi juga di dalam Kristen, yang politisinya menggunakan Al-Kitab membela kepentingan politik dan kekuasaan golongan dan kelompoknya.

Kasus Al-Maidah 51 telah melahirkan pro dan kontra baik di kalangan kaum intelektual maupun masyarakat luas. Di kalangan kaum intelektual Muslim sebagian tokoh berpihak kepada Ahok yang dinilai tidak bermaksud menistakan agama, dan sebagian kontra Ahok yang yakin dengan adanya niat dan tindakan penistaan dalam ucapannya di kepulauan Seribu. Sikap pro dan kontra ini memunculkan tafsir yang beragam dari Al-Maidah 51. Qurays Shihab, Syafi'i Maarif, Sahal Mahfuz, Said Agil Sirodj, Nusron Wahid dan sebagian besar tokoh NU menafsirkan bahwa ayat tersebut tidak bicara soal kepemimpinan non-Muslim. Sedangkan imam besar FPI Habib Rizieq bin Sihab, AA Gym, Wasekjen MUI, Ireana, Bakhtiar Nasir, Felix Saw, dan Kyai Rasyid Abdullah Syafi'i menafsirkan bahwa ayat tersebut jelas berbicara larangan kepemimpinan non-Muslim.

Qurays Shihab dalam sebuah dialog di majelis taklim ditanya tentang Al-Maidah 51 khususnya makna dari kata *auliya* yang menjadi perdebatan di dalam ayat tersebut. Menurutnya kata *auliya* bukan berarti pemimpin, tetapi adalah teman dekat, teman setia yang berpotensi mengetahui dan bisa membocorkan rahasia. Wali kota harus dekat dengan rakyatnya, wali nikah adalah orang yang dekat dengan anaknya. Qurays Shihab juga menjawab pertanyaan apakah lebih baik memilih pemimpin yang kafir atau Muslim? Beliau mengilustrasikan kepemimpinan di pesawat, bila pilotnya kafir tapi lebih berpengalaman dan lebih mampu daripada pilot yang Muslim, anda mau pilih pilot yang mana tanya Qurays Shihab kepada ²⁰liens yang hadir di majelisnya (Shihab, 2017). Syafi'i Maarif, tokoh senior Muhammadiyah menyatakan bahwa tidak ada unsur penistaan agama dalam ceramah Ahok di kepulauan Seribu. Ahok sendiri menurut Syafi'i tidak memiliki niat untuk menghina Al-Quran ataupun para ulama. Gus Mus juga mempunyai pandangan yang sama dengan Syafi'i Maarif bahwa terlalu berlebihan ketika menuntut Ahok untuk diadili, sedangkan dia sudah minta maaf (Maarif, 2016).

Nusron Wahid (2016) dengan tegas menolak segala tuduhan yang dialamatkan ke Ahok dan melihat adanya kepentingan politik yang sangat kuat dibelakang kasus ini. Nusron di acara ILC TVone menyatakan, umat Islam sering ramai gara-gara dua hal, kal tidak salah faham, fahamnya salah. Dia juga menyoroti MUI yang tidak melakukan tabayun ke Ahok terlebih dahulu sebelum mengeluarkan fatwa penistaan agama. Mereka tidak memberikan surat peringatan atau memanggil Ahok. Nusron juga menolak tafsir Al-Maidah 51 yang selama ini berkembang yang tidak membolehkan Kristen dan Yahudi menjadi pemimpin. Menurutnya, apakah ulama sekarang lebih pintar dari ulama-ulama sebelumnya yang mana pada masa khalifah Abbasiyah masa raja Mustaiz pernah mengangkat gubernur orang Kristen. Dia juga

menyayangkan adanya klaim tafsir kebenaran oleh masing-masing tokoh padahal yang paling benar itu hanya dari Allah sambil mengutip ayat “الحق من ربك”. Yang paling tahu kebenaran tafsir Al-Quran ya Allah sendiri, bukan MUI, bukan kita. Yang paling tahu makna ungkapan Ahok ya si Ahok, bukan Ahmad Dhani, bukan Buni Yani, bukan Guntur, bukan MUI, dan bukan Danil Simanjuntak.

Menurut Imam Besar Habib Rizieq (2016) bahwa ada ulama zindiq yang megaku Islam tetapi membela-bela orang kafir menjadi pemimpin. Dia menyindir ulama lain yang logikanya keliru ketika mengartikan kata *auliya* bukan pemimpin, tetapi pelindung atau sahabat setia. Rizieq menjelaskan bahwa kata *auliya* sendiri memiliki arti yang bermacam-macam, bisa berarti pelindung, penolong, pemimpin, pengatur, dan pengurus. Dalam surat Al-Maidah 51 artinya adalah pemimpin, bukan pelindung dengan logika bahwa dijadikan pelindung saja tidak boleh apalagi pemimpin. Kalau pelindung itu hanya melindungi komunitas di lingkungannya, tetapi kalau pemimpin itu skupnya lebih besar. Jelas tafsir ini keliru dan tidak sesuai karena orang Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh diangkat jadi pelindung, apalagi jadi pemimpin. Menurutnya tidak hanya Al-Maidah 51 yang melarang mengangkat orang kafir jadi pemimpin, ada belasan ayat yang melarang kita mengangkat orang kafir jadi pemimpin.

Caknun memiliki tafsir yang berbeda, kenapa harus keberatan sedangkan Ahok sudah jadi gubernur DKI Jakarta. Menurut Caknun (2016) Ahok bukan orang Kafir karena meyakini adanya Tuhan, Ahok juga mengagumi ayat suci Al-Quran dan mengecam agamanya sendiri, maka lebih tepat dikatakan dia musyrik dan munafik. Caknun mengkritisi adanya kekuatan dan desain besar dibalik ini, Ahok hanya bagian kecil dari rancangan besar tersebut. Anda harus melihat *longshot* atau potret jarak jauh. Semuanya kemunafikan, bicaranya pembangunan, padahal bukan, infrastruktur tapi bukan, ini semua hanya buangan dan perjanjian pemodal-pemodal besar. Yanuar Ilyas (2016), ketua PP Muhammadiyah mengatakan, saya cemburu dengan pak Ahok, saya sudah sering membahas ayat ini, tetapi saya kurang populer. Pak Ahok sekali menyebutkan langsung terkenal. Surat Al-Maidah 51 harus dipahami juga ayat-ayat yang lain karena ini berkaitan, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kata *أولياء* memiliki makna macam-macam, ada yang artinya pemimpin, pengasuh, pelindung, sahabat setia, dan kekasih. Ketika Umar bin Khattab memanggil gubernur Musa Al-Asyari meminta laporan pengumpulan dana dan penggunaannya untuk rakyat, beliau terkagum ketika diberikan laporan tersebut karena sangat rapi dan beliau meminta orang yang menulis laporan itu disuruh ke masjid dan membacakannya. Asyari mengatakan orangnya tidak bisa. Lalu Umar mengatakan apakah dia junub, bukan Umar tetapi dia beragama Kristen. Umar lalu menepuk pundak Asyari dan membacakan surat Al-Maidah 51. Ilyas menjelaskan, jangankan jadi pemimpin, jadi akunting saja tidak boleh.

Bagaimana dengan agama-agama lain termasuk Hindu dan Budha seandainya mereka mencalonkan diri jadi pemimpin, Ilyas mengatakan kita harus merujuk pada surat al-imron 144 yang mengatakan *لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين*, kata kafirin disini termasuk Hindu, Budha dan agama-agama lain. Dalam ayat tersebut Ilyas menjelaskan bahwa Allah mengancam lebih keras apabila memaksakan kehendak melakukan tindakan tersebut. Al-Maidah 51 juga harus dilihat ke ayat-ayat lain misalnya Al-Maidah 53 dan 55. Misalnya ayat 53 mengatakan tidak boleh makan babi, kalau mau pakai analogi pak Ahok jangan mau dibohongi Al-Maidah 53 untuk menghalalkan babi. Ibu-ibu bisa mengatakan jangan mau dibohongin pakai Annisa ayat 3 untuk menentang poligami. Dalam ceramahnya itu Ilyas menyatakan Muhammadiyah itu hanya bicara saja poligami, tetapi tidak dipraktikkan. Kalau MUI jelas mengatakan itu penistaan terhadap ulama, maka ini sudah jelas hukumnya, tidak perlu tanya ustaz yang lain. Kalau ada yang satu mengatakan tidak apa-apa tergantung niat, itu pembenaran, bukan mencari kebenaran.

Nazarudin Umar (2016), dosen UIN Jakarta dan Imam masjid Istiqlal ketika diwawancarai oleh TVone menjelaskan konteks turunnya ayat Al-Miadah 51 di akhir perang

Tabuk ketika Abdullah bin Ubai bin Abi Salul yang membangun masjid untuk memprovokasi umat Islam. Dia juga bekerjasama dengan Yahudi dan Nasra²⁷ sebagai sekutu. Menurutnya pak Ahok salah dalam berstatemen ketika menyatakan “kata dibohongi pakai Al-Maidah 51 dan macam-macam”, jangan terlalu jauh membawa ayat ini ke dalam politik. Bisa menyakiti telinga orang lain yakni umat Islam. AA Gym (2016), salah satu tokoh agama menyatakan kepada jamaahnya supaya mendoakan Ahok untuk mendapat hidayah. Kita doakan yang baik-baik aja walaupun iman itu urusan Allah.

Kyai Said Aqil Siradj (2016), ketua umum PB NU cenderung mengikuti pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mentakan, lebih baik “pemimpin non Muslim tapi adil, daripada Muslim tapi zalim”. Karena ini urusan dunia, maka adil itu lebih penting meskipun nanti kebaikannya tidak mendapat pahala. Kepemimpinan yang adil jauh lebih baik daripada yang zalim karena dapat merusak dan menghancurkan sebuah negara. Keadilan disini lebih penting daripada agama, tetapi dengan sarat teman-teman Muslim tidak ada yang kompeten atau kurang kapabel. Said Aqil Husin Al-Munawar (2016), mantan Menteri Agama dan guru besar Tafsir Hadis Fakultas UIN Jakarta berpendapat bahwa Al-Maidah 51 sudah jelas untuk tidak menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. Apalagi yang mau ditafsirkan lagi, dua kali dalam ayat tersebut dikatakan “laa”, kata Laa, tidak ada takwil lain, itu laa “nahyi yufidut tahrir”, yang berarti tidak boleh atau jangan sekali-kali. Beliau lebih menjelaskan bahwa bukan hanya muwalah (urusan kepemimpinan) saja yang diharamkan, tetapi juga mendukung atau meminta dukungan. Dia juga mengkritisi orang yang mengutip Ibnu Taimiyah yang membolehkan non-Muslim jadi pemimpin tanpa melihat kondisi “daruratnya”.

Terlepas dari perbedaan penafsiran di atas, kasus Ahok yang menyebut Al-Maidah 51 telah menimbulkan protes yang keras dari kelompok Islamis. Mereka merasa disakiti oleh ucapan Ahok yang memposisikan Al-Maidah 51 sebagai alat pembohong. Akan tetapi tidak semua tokoh Islam sepakat bahwa Ahok telah meninstakan agama. Yang banyak menentang dan menuntut Ahok diadili adalah FPI, Muhammadiyah, HTI, FUI dan PKS yang mengklaim jelas adanya kesengajaan untuk menghina umat Islam dan para ulama. Berbeda dengan Ormas Islam terbesar di Indonesia seperti NU dan kelompok Islam moderat tidak mempermasalahkan ucapan Ahok yang dinilai adalah kritik bagi politisi Muslim yang seringkali menggunakan symbol agama. Zuhairi Misrawi, tokoh pemuda NU mengatakan dalam sebuah dialog di TV swasta bahwa tidak ada pengaruh dari ungkapan Ahok terhadap keimanan umat Islam. Apalagi Ahok tidak bermaksud menghina Islam dan melecehkan Al-Quran, dan yang terpenting adalah dia telah minta maaf berulang-ulang. Misrawi menyayangkan kenapa tidak memaafkan Ahok sesuai dengan ajaran Islam, kalau sudah minta maaf, ya harus dimaafkan toh juga tidak mengubah keislaman kita selaku umat Islam. Ayat Al-Maidah itu ayat perang, tidak bisa serta merta digunakan untuk konteks sekarang. Zuhairi juga dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa sulit untuk mencari sosok Ahok yang benar-benar bersih dan ingin mengabdikan diri kepada rakyat. Ahok dan Jokowi telah selesai hidupnya, mereka hanya memikirkan rakyat.

Pengaruh Kasus Ahok Terhadap Politik, Ekonomi dan Relasi Beragama

Ungkapan Ahok di kepulauan Seribu menimbulkan dampak sosial politik yang luar biasa. Kekuasaan kabinet kerja Jokowi-JK mengalami turbulensi hebat ketika menghadapi aksi demonstrasi menuntut Ahok untuk dipenjarakan dan menargetkan revolusi menumbangkan pemerintahan yang sah karena dinilai melindungi Ahok. Aksi super damai 411 dan 212 adalah aksi demonstrasi terbesar umat Islam di dunia khususnya di Indonesia. Hampir 2-3 juta orang berkumpul dengan menggunakan baju dan peci serba putih datang dari berbagai daerah di Indonesia melantunkan selawat dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Guncangan politik dari aksi-aksi tersebut terasa dan mulai mengkhawatirkan tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga rakyat Indonesia. Suasana yang mencekam ini dikhawatirkan akan terjadi perang saudara dan bangsa Indonesia akan mengalami keterbelahan dahsat seperti di Iraq, Afganaistan dan Suria.

Dampak lain dari aksi bela Islam adalah terpecahnya suara umat Islam, sebagian pro Ahok dan sebagian kontra Ahok. Perdebatan-perdebatan panjang antara pro dan kontra terus berlanjut baik di media cetak maupun elektronik. Bahkan antara sesama umat Islam seringkali kebablasan saling mengkafirkan karena beda pilihan dan afiliasi politiknya. Yang dianggap pro Ahok adalah kelompok yang sesat, pengikut PKI, pro kapitalis, sedangkan yang kontra Ahok diklaim fundamentalis, tidak toleran dan anti Pancasila. Kelompok Islam skriptualis dan fundamentalis mayoritas menentang Ahok termasuk FPI, PUI, HTI, PKS dan Muhammadiyah. Sedangkan kelompok Islam tradisional seperti NU mayoritas mendukung Ahok, dan hanya sebagian kecil yang kontra. Para artis di Indonesia juga mengalami perpecahan, mayoritas mendukung Ahok seperti kelompok band Slank, Tompi, Niji, Once dan lain-lain.

Di sektor ekonomi juga tidak luput terkena dampak aksi demonstrasi khususnya di sekitar DKI Jakarta. Aksi penjarahan pasca 411 dan juga aksi keluar negeri para pengusaha dan pemilik toko terutama etnis Tionghoa karena takut aksi kekerasan akan terulang seperti yang terjadi pada 1998 yang menimbulkan kerugian ratusan juta. Mereka harus menutup aktivitas dagang dan pertokoan mereka yang ditaksir omsetnya mencarai 500 juta. Aksi ini juga berdampak pada respon negatif pasar karena banyaknya investor yang mulai memikirkan kembali kegiatan investasinya di Indonesia. Mereka khawatir kondisi Jakarta tidak terkontrol lagi dan aksi kekerasan serta kudeta kepada pemerintahan Jokowi kembali terjadi seperti di era Suharto.

Sedangkan pada aspek hubungan antara agama semakin terancam dengan tuntutan kasus Ahok ke pengadilan. Kelompok minoritas Kristen yang menjadi mayoritas di berbagai daerah termasuk di Papua, NTT, Kaltim dan Kalbar melakukan serangan balik kepada tokoh-tokoh FPI dan MUI. Wakil Sekjen MUI, Tengku Zulkarnain dihadang oleh kelompok adat Dayak Dayak pada 12 Januari 2017 di bandara Sintang ketika mau turun dari pesawat Garuda. Aksi penghadangan ini disertai dengan membawa Mandau dan sepanduk yang berisi penolakan FPI. Pemimpin aksi menyatakan bahwa “ini kami kafir, di sini tanah kafir jangan diinjak”. Selain itu mereka juga memasang sepanduk yang menuntut pembubaran FPI yang dinilai anti Pancasila, UUD 45 dan mengancam keutuhan NKRI. Menurut kepala adat, mereka tidak merencanakan ini, penghadangan spontan terjadi karena Tengku Zulkarnain dianggap provokatif terhadap kelompok minoritas dan seringkali men²²a-ngatai mereka kafir di media sosial. Penghadangan Tengku merupakan efek dari gerakan aksi bela Islam yang dikomandoi oleh FPI dan GNPf MUI. Beberapa daerah yang mayoritas Kristen mendklarasikan kemerdekaan termasuk Papua karena tidak terima perlakuan umat Islam terhadap Ahok. Fakta lain bahwa umat Islam di NTT mulai berkemas-kemas eksodus apabila ada serangan dari kelompok mayoritas Kristen di kampung mereka (Panjimas, 2017).



Gambar 1. Tokoh adat Dayak di Kalabar menghadang Wasekjen MUI KH. Tengku Zulkarnain ketika mengisi Tabligh Akbar di Kalimantan Barat (2/01/2017).

Kontestasi Aksi Super Damai 212 dan 412 Parade Budaya Kebhinekaan

Protes terhadap Ahok dalam kasus Al-Maidah 51 terus berlanjut dan mengalami puncak pada aksi 212 pada 2 Desember 2016. Aksi ini dihadiri oleh jutaan umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Aksi ini juga dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Amin Rais, Egi Sujana, Fahri Hamzah, Yusuf Mansur, Abdullah Gymnastiar, TGB. Muhammad Zainul Majdi. Agenda mereka mendesak pemerintah untuk menahan Ahok setelah ditetapkan sebagai tersangka pasca aksi 411 sebelumnya. Aksi 212 ini adalah aksi terbesar umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia yang dihadiri tidak kurang dari 2 juta orang. Aksi ini dimulai dari shalat subuh bersama di masjid Istiqlal dan shalat Jumat di lapangan Monas.

Aksi 212 dikenal juga dengan aksi super damai, di mana para demonstran ingin menunjukkan bahwa Islam itu damai dan mendukung keadilan (Dony, 2016). Jika pemerintah tidak adil maka Islam juga dapat bergerak menuntut ketidakadilan tersebut seperti dalam kasus Ahok. Menurut Habib Rizieq bin Syihab dalam sambutannya menyatakan bahwa Ahok harus ditahan setelah jadi tersangka. Aksi ini murni untuk menekan penegak hukum dan pemerintah untuk segera menahan Ahok. Umat Islam dinilai tidak mendapat keadilan ketika dihina dan dinistakan oleh orang luar. Rizieq juga mengkritisi upaya pemerintah yang menghalangi pertemuan tersebut dari berbagai arah baik udara, darat dan laut. Kepolisian berupaya untuk menghentikan aksi 212 dan menghalai kelompok dari luar daerah yang datang ke Jakarta.

Pada saat shalat Jumat para peserta diguyur hujan. Meski demikian hujan tersebut tidak mengurangi kekhusuan melaksanakan shalat Jumat. Habib Rizieq di dalam khutbah Jumatnya menyampaikan bahwa agenda kedepan tidak hanya menuntut Ahok ditahan, tetapi juga menegakkan Al-Maidah 51 di Indonesia. Al-Maidah 51 harus ditegakkan karena umat Islam adalah mayoritas dan harus menjadi pemimpin. Kita tetap menghormati agama lain, Indonesia bisa damai tanpa penistaan agama, tanpa LGBT, tanpa liberalisme dan tanpa ajaran sesat. Tito Karnavian dalam sambutannya mengapresiasi aksi damai dan menilai kemiripan pertemuan ini seperti ibadah di Arafah. Tito memberikan penjelasan perkembangan kasus Ahok yang telah dinyatakan sebagai tersangka dan akan diproses ke pengadilan. Oleh karena itu katanya, mari kita kawal kasus ini sampai selesai. Pidato Tito sempat diganggu oleh suara demonstran yang teriak "tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga" (2016).

Jokowi yang didampingi oleh wakil presiden Jusuf Kalla, panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim, berjalan menuju Monas menggunakan payung karena hujan. Jokowi dan rombongan ikut shalat Jumat bersama para tokoh demonstrasi kemudian bergeser ke mimbar aksi memberi sambutan. Dalam sambutannya Jokowi mengucapkan terima kasih kepada semua peserta aksi yang telah berkumpul, dan berzikir di Monas. Jokowi juga menyampaikan pesan supaya kembali ke tempat masing-masing dengan selamat. Yang menarik, Jokowi sendiri tidak menyinggung kasus Ahok sama sekali sehingga membuat riuh dan ketidakpuasan kelompok demonstran.

Dua hari setelah acara 212, beberapa partai politik mengadakan aksi 412 yang mengambil tema kebhinekaan. Aksi ini dianggap sebagai aksi tandingan dari 212 yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam Aksi 412 terbentang bendera merah putih yang panjang dan beberapa bendera partai politik yakni partai Golkar dan partai Nasdem. Aksi ini menghadirkan berbagai macam budaya dan tradisi yang ditampilkan di panggung. #Kita Indonesia adalah tagar yang dibuat dalam aksi ini. Beberapa tokoh yang hadir memberi sambutan pada aksi 412 yaitu Surya Paloh, ketua umum partai Nasdem. Surya Paloh (2016) dalam sambutannya bertanya kepada para peserta yang hadir *siapa kita*, yang dijawab dengan *kita Indonesia*. Dia juga menekankan pentingnya saling percaya satu sama lain dan menjaga persatuan. Kita butuh mengisi kemerdekaan ini dan melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa, kata Paloh dalam sambutannya.

Aksi 212 dan 412 memperlihatkan kontestasi identitas antara kedua kelompok yang pro dan kontra Ahok. Jika aksi 212 menunjukkan identitas keIslaman, sedangkan 412 membawa identitas kebhinekaan yang lebih plural. Aksi 212 diisi dengan zikir dan tuntutan keadilan dalam kasus Ahok, sedangkan di aksi 412 diisi dengan pertunjukan budaya dan seni dari berbagai daerah. Pakain yang digunakan juga berbeda, aksi 212 menggunakan pakaian putih-putih dan peci khas Islam dan bendera tauhid, sedangkan aksi 412 menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah dan bendera merah putih. Kedua aksi ini memiliki agenda ingin membawa Indonesia ke dalam perdamaian dan kemajuan, namun dengan pendekatan yang berbeda.



Gambar 2. Aksi 212 di Monas yang dihadiri 2 juta umat Islam dari berbagai daerah (2/12/2016)



Gambar 3. Jokowi memberi sambutan pada acara aksi 212 yang didampingi oleh Yusuf Kalla, Gatot Nurmantyo, Wiranto, Lukman Hakim (2/12/2016)

SIMPULAN (PENUTUP)

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok menjadi pelajaran penting dalam menata kembali sikap toleransi dan hubungan antara umat beragama. Selain sebagai pelajaran, kasus Ahok juga menjadi babak baru dalam melihat tantangan-tantangan toleransi di masyarakat Indonesia yang majemuk yang dijamin hak politiknya. Sejak kasus ini muncul pro dan kontra terus bergulir melihat sikap pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Pemerintah sepertinya mengalami dilemma karena tekanan umat Islam melalui aksi demonstrasi 411 dan 212 yang dikomendoi oleh FPI dan GNPf MUI menuntut penahanan Ahok dan pembatalan pencalonannya setelah jadi tersangka. FPI yang dari awal tidak setuju pencalonan Ahok menjadi wakil gubernur di Pilkada 2012 terus menyuarakan penolakannya pada pencalonan

Ahok sebagai calon gubernur pada Pilkada 2017. Kasus penistaan agama mengalami politisasi yang dijadikan pintu masuk untuk menurunkan elektabilitas Ahok, bahkan untuk menggagalkan pencalonannya. Pelajaran toleransi yang sangat fundamental di sini adalah sejauh mana keberterimaan masyarakat Muslim sebagai mayoritas dipimpin oleh kelompok minoritas. Jika menolak anak bangsa sebagai calon pemimpin bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pelajaran toleransi yang lain adalah keterbukaan dalam menerima kritik dari pihak luar terhadap perilaku politik umat Islam. Ahok beralasan menyinggung surat Al-Maidah 51 karena seringkali digunakan oleh politisi Muslim menghasut massa untuk menjatuhkan lawan politiknya terutama yang non-Muslim. Pengalaman di Pilkada Babel 2007 menunjukkan adanya fenomena yang sama dengan Pilkada Jakarta 2017 di mana Ahok diserang menggunakan Al-Maidah 51. Penggunaan Al-Maidah 51 ini oleh politisi Muslim secara musiman mencerminkan etika politik yang kurang tepat karena berlindung di balik ayat suci. Pemikiran dan statemen dari kelompok non-Muslim dapat dilihat sebagai bagian dari kritik, bukan penistaan agama. Meskipun jutaan orang berkumpul di Monas, tapi masih banyak juga yang tidak ikut dan dipertanyakan sikap politik mereka terkait dengan surat Al-Maidah dan status kepemimpinan non-Muslim di tengah mayoritas masyarakat Muslim.

Dampak sosial yang ditimbulkan dalam kasus Ahok tidak hanya berpotensi pada keterbelahan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan toleransi kedepannya. Keterbelahan di kalangan Muslim menyikapi kasus Ahok terlihat dari aksi dukungan yang diberikan. Sebagian ulama yang suka dengan kinerja Ahok tidak mempersoalkan statemen Ahok di Kepulauan Seribu. Namun sebagian juga sangat resisten dan ikut aksi menuntut penegakan hukum kepada Ahok yang mereka nilai telah melecehkan kitab suci Al-Quran dan para ulama Muslim. Karena Ahok didukung oleh Jokowi dan pemerintah sebagai hasil dari mitra politik sebelumnya, maka situasi cukup berimbang. Akibatnya, Jokowi juga menjadi sasaran dari kelompok aksi dengan agenda menumbangkan kekuasaan Jokowi dan berupaya mengalahkannya pada Pilpres 2019. Selain itu, muncul phobia-phobia atas simbol agama. Misalnya Islamophobia muncul di kalangan pendukung Ahok, semua berbau syariah dan wacana khilafah dinilai melanggar Pancasila dan Undang-undang 45. Sebaliknya di kalangan penentang Ahok muncul Kristenphobia, beberapa tokoh Kristen yang memegang jabatan public termasuk kepada sekolah menjadi target serangan. Islamophobia dan Kristenphobia adalah bagian dari tantangan toleransi ke depan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Najwa, and Mohamed Nawab Mohamed Osman. 2018. "Islamisation in the Indonesian Media Spaces New Sites for a Conservative Push." *Journal of Religious and Political Practice* 4(3): 214–32.
- Elektoral, D I Tahun. 2019. "Konstelasi Politik Di Tahun Elektoral." 15(726).
- Hamdi, Saipul. 2017. "Conflicting Religious Identities : " 6(2): 247–62.
- Huda, M. Syamsul. 2019. "The Local Construction of Religious Blasphemy in East Java." *Journal of Indonesian Islam* 13(1): 96–114.
- Komunikasi, Jurnal Ilmu et al. 2017. "Analisis Wacana Makrostruktural Pemberitaan Ahok Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 Vidya Mandarani Nyoman Suwarta (Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Abstrak Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Analisis Makrostruktural." 5(2): 113–20.

- Kurniawan, Budi. 2018. "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama* 12(1): 133.
- Lestari, Dina. 2019. "Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas Di Indonesia." *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 4(4): 12.
- Malik, Abdul. "No Title."
- Mayasari, Silvina. 2017. "Konstruksi Media Terhadap Berita Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing Pada Surat Kabar Kompas Dan Republik." VIII(September): 8–18.
- Miichi, Ken. 2014. "The Role of Religion and Ethnicity in Jakarta's 2012 Gubernatorial Election." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 33(1): 55–83.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2018. "Politik Identitas Dan Mitos Pemilih Rasional." *Maarif* 13(2): 68–86.
- Nasrudin, Juhana, and Ahmad Ali Nurdin. 2019. "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1(1): 34–47.
- Prayogi, Irfan. 2019. "Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11(2): 31–43.
- Rani, Samsul. 2019. "Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pilkada Di Indonesia." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17(33): 112.
- Studies, Area. 2014. "Journal of Current Southeast Asian Affairs." : 85–109.
- Supriyadi, Mohammad. 2015. "Mengukur Politisasi Agama Dalam Ruang Publik: Komunikasi SARA Dalam Perdebatan Rational Choice Theory." *Jurnal Keamanan Nasional* 1(3): 387–426.

Pilkada Rasa Pilpres Al-Maidah 51 dan Politisasi Simbol Agama dalam Kontestasi Politik di Pilkada DKI Jakarta

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sloap.org Internet Source	1%
2	beritabarumurni.blogspot.com Internet Source	<1%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
4	kolom.tempo.co Internet Source	<1%
5	journal.epistemikpress.id Internet Source	<1%
6	core.ac.uk Internet Source	<1%
7	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1%
8	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
9	issuu.com Internet Source	<1%

10	koleksitugasku.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
12	www.umm.ac.id Internet Source	<1 %
13	ioanesrakhmat.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	www.neliti.com Internet Source	<1 %
15	agunkzscreamo.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	bogordaily.net Internet Source	<1 %
17	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
18	kabarlagi.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	mesothelioma-medical-86400.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	www.indonesiana.id Internet Source	<1 %
21	ceremende.blogspot.com Internet Source	<1 %

22	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
23	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
24	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
25	iqbalunimed.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	library.jakarta.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
27	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
28	saungobby.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	tebuireng.org Internet Source	<1 %
30	www.globalmuslim.web.id Internet Source	<1 %
31	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
32	jonaediefendi.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Pilkada Rasa Pilpres Al-Maidah 51 dan Politisasi Simbol Agama dalam Kontestasi Politik di Pilkada DKI Jakarta

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

RUBRIC: 6TH-8TH SCIENCE ARGUMENT (CER)

CLAIM

Take an arguable position on the scientific topic and develop the essay around that stance.

ADVANCED	The essay introduces a precise, qualitative and/or quantitative claim based on the scientific topic or text(s), regarding the relationship between dependent and independent variables. The essay develops the claim and counterclaim fairly, distinguishing the claim from alternate or opposing claims.
PROFICIENT	The essay introduces a clear, qualitative and/or quantitative claim based on the scientific topic or text(s), regarding the relationship between dependent and independent variables. The essay effectively acknowledges and distinguishes the claim from alternate or opposing claims.
DEVELOPING	The essay attempts to introduce a qualitative and/or quantitative claim, based on the scientific topic or text(s), but it may be somewhat unclear or not maintained throughout the essay. The essay may not clearly acknowledge or distinguish the claim from alternate or opposing claims.
EMERGING	The essay does not clearly make a claim based on the scientific topic or text(s), or the claim is overly simplistic or vague. The essay does not acknowledge or distinguish counterclaims.

EVIDENCE

Include relevant facts, definitions, and examples to back up the claim.

ADVANCED	The essay supplies sufficient relevant, accurate qualitative and/or quantitative data and evidence related to the scientific topic or text(s) to support its claim and counterclaim.
PROFICIENT	The essay supplies relevant, accurate qualitative and/or quantitative data and evidence related to the scientific topic or text(s) to support its claim and counterclaim.
DEVELOPING	The essay supplies some qualitative and/or quantitative data and evidence, but it may not be closely related to the scientific topic or text(s), or the support that is offered relies mostly on summary of the source(s), thereby not effectively supporting the essay's claim and counterclaim.
EMERGING	The essay supplies very little or no data and evidence to support its claim and counterclaim, or the evidence that is provided is not clear or relevant.

REASONING

Explain how or why each piece of evidence supports the claim.

ADVANCED	The essay effectively applies scientific ideas and principles in order to explain how or why the cited evidence supports the claim. The essay demonstrates consistently logical reasoning and understanding of the scientific topic and/or text(s). The essay's explanations anticipate the audience's knowledge level and concerns about this scientific topic.
----------	--

PROFICIENT	The essay applies scientific reasoning in order to explain how or why the cited evidence supports the claim. The essay demonstrates logical reasoning and understanding of the scientific topic and/or text(s). The essay's explanations attempt to anticipate the audience's knowledge level and concerns about this scientific topic.
DEVELOPING	The essay includes some reasoning and understanding of the scientific topic and/or text(s), but it does not effectively apply scientific ideas or principles to explain how or why the evidence supports the claim.
EMERGING	The essay does not demonstrate clear or relevant reasoning to support the claim or to demonstrate an understanding of the scientific topic and/or text(s).

FOCUS

Focus your writing on the prompt and task.

ADVANCED	The essay maintains strong focus on the purpose and task, using the whole essay to support and develop the claim and counterclaims evenly while thoroughly addressing the demands of the prompt.
PROFICIENT	The essay addresses the demands of the prompt and is mostly focused on the purpose and task. The essay may not acknowledge the claim and counterclaims evenly throughout.
DEVELOPING	The essay may not fully address the demands of the prompt or stay focused on the purpose and task. The writing may stray significantly off topic at times, and introduce the writer's bias occasionally, making it difficult to follow the central claim at times.
EMERGING	The essay does not maintain focus on purpose or task.

ORGANIZATION

Organize your writing in a logical sequence.

ADVANCED	The essay incorporates an organizational structure throughout that establishes clear relationships among the claim(s), counterclaims, reasons, and evidence. Effective transitional words and phrases are included to clarify the relationships between and among ideas (i.e. claim and reasons, reasons and evidence, claim and counterclaim) in a way that strengthens the argument. The essay includes an introduction and conclusion that effectively follows from and supports the argument presented.
PROFICIENT	The essay incorporates an organizational structure with clear transitional words and phrases that show the relationship between and among ideas. The essay includes a progression of ideas from beginning to end, including an introduction and concluding statement or section that follows from and supports the argument presented.
DEVELOPING	The essay uses a basic organizational structure and minimal transitional words and phrases, though relationships between and among ideas are not consistently

clear. The essay moves from beginning to end; however, an introduction and/or conclusion may not be clearly evident.

EMERGING

The essay does not have an organizational structure and may simply offer a series of ideas without any clear transitions or connections. An introduction and conclusion are not evident.

LANGUAGE

Pay close attention to your tone, style, word choice, and sentence structure when writing.

ADVANCED

The essay effectively establishes and maintains a formal style and objective tone and incorporates language that anticipates the reader's knowledge level and concerns. The essay consistently demonstrates a clear command of conventions, while also employing discipline-specific word choices and varied sentence structure.

PROFICIENT

The essay generally establishes and maintains a formal style with few possible exceptions and incorporates language that anticipates the reader's knowledge level and concerns. The essay demonstrates a general command of conventions, while also employing discipline-specific word choices and some variety in sentence structure.

DEVELOPING

The essay does not maintain a formal style consistently and incorporates language that may not show an awareness of the reader's knowledge or concerns. The essay may contain errors in conventions that interfere with meaning. Some attempts at discipline-specific word choices are made, and sentence structure may not vary often.

EMERGING

The essay employs language that is inappropriate for the audience and is not formal in style. The essay may contain pervasive errors in conventions that interfere with meaning, word choice is not discipline-specific, and sentence structures are simplistic and unvaried.